

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada sekretariat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

1. Data struktur kepengurusan pondok pesantren.
2. Jumlah komplek yang ada di pondok pesantren
3. Jumlah kiai yang mengasuh pondok pesantren
4. Jumlah santri saat ini
5. Data aktivitas politik di lingkungan pondok pesantren.

B. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul

1. Data jumlah pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2015
2. Upaya sosialisasi pilkada Bantul tahun 2015 khususnya di lingkungan pesantren.
3. Proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2015.
4. Hasil pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2015.

C. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak

1. Apakah bapak terlibat atau berpartisipasi dalam Pilkada Bantul 2015?

2. Apakah bapak turut memberikan suara atau voting dalam Pilkada Bantul 2015?
3. Apakah bapak ikut serta dalam kegiatan diskusi politik dalam Pilkada Bantul 2015?
4. Apakah bapak mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilkada Bantul 2015?
5. Apakah bapak membentuk atau ikut bergabung dalam kelompok kepentingan dalam rangka Pilkada Bantul 2015?
6. Apakah bapak melakukan komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif dalam Pilkada Bantul 2015?
7. Apakah bapak menjadi pendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Bantul 2015?
8. Faktor apa yang menjadi pertimbangan bapak untuk memilih salah satu pasangan calon?
9. Apakah bapak memiliki kekerabatan khusus dengan salah satu pasangan calon?
10. Apakah kandidat yang bapak pilih harus bersuku dan berbahasa asli Jawa?
11. Apakah ada adat istiadat tertentu yang menjadi bahan pertimbangan tersendiri untuk bapak sehingga memilih salah satu pasangan calon?
12. Apakah agama menjadi bahan pertimbangan?
13. Apakah ideologi kenegaraan dari kandidat penting untuk dipertimbangkan?

14. Apakah ada tokoh tertentu yang mempengaruhi pilihan politik bapak?
15. Apakah bapak memiliki relasi politik tertentu dengan salah satu partai politik?
16. Apakah ada faktor sosial yang bapak pertimbangkan?
17. Apakah ada latar belakang ekonomi yang menjadi pertimbangan?
18. Adakah budaya tertentu yang terkait dengan Pilkada Bantul 2015?

Panduan Observasi

Dalam penelitian ini langkah-langkah observasi yang dilakukan yaitu wawancara dengan narasumber yang relevan. Wawancara dilakukan beberapa instansi terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul untuk mendapatkan informasi proses pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul secara keseluruhan. Pihak lain yaitu Sekretariat Pesantren Al-Munawwir Krapyak guna mendapat informasi seputar pesantren sebagai salah satu objek penelitian. Informan utama dalam penelitian yaitu kiai di pondok pesantren Al-Munawwir untuk mengetahui perilaku politik kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah Bantul Tahun 2015.

Pra penelitian telah dilakukan dengan mencari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian akan dilaksanakan setelah proposal mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Setelah proposal penelitian ini diujikan maka langkah selanjutnya adalah mencari data primer dengan terlebih dahulu meminta surat izin penelitian kepada jurusan yang kemudian dimasukkan di Bappeda Bantul. Bappeda Bantul memberikan surat tembusan untuk Dekanat, KPUD Bantul, serta Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. Setelah surat tembusan didapatkan, maka proses wawancara mulai dilaksanakan.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui perilaku dan partisipasi politik kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015. Beberapa

pertanyaan yang akan disampaikan telah dicantumkan di lampiran I. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi mendalam yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini.

Profil Abdul Halim Muslih



H. Abdul Halim Muslih lahir di Rembang pada tanggal 29 April 1970. Namanya dikenal publik sebagai anggota legislatif DIY, penasihat PC GP Ansor Bantul, dan pengurus PKB Bantul dan DIY. Namanya semakin dikenal publik setelah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021 berpasangan dengan Drs._H. Suharsono.

Bersama Suharsono, Halim berhasil mengungguli pasangan petahana, Hj. Sri Surya Widati, dengan perolehan suara 53%. Dengan keunggulan itu dirinya bersama Suharsono dinyatakan oleh KPU Bantul sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015. Halim dilantik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X tanggal 17 Februari 2016 dan sejak saat itu resmi menjabat Wakil Bupati Bantul untuk masa jabatan 2016-2021.

Berikut profil lengkap H. Abdul Halim Muslih yang dituliskan dalam website resmi Kabupaten Bantul:

Tempat dan Tanggal Lahir: Rembang, 29 April 1970

Istri: Emi Masruroh, S.Pd.

Anak: Alwa Sofa

Naila Marwa.

Alamat: Singosaren RT 04, Wukirsari, Imogiri, Bantul.

Riwayat Pendidikan:

SD Nawawiah Rembang (1977-1983)

MTs Muallimin Muallimat Rembang (1981-1986)

MA Muallimin Muallimat Rembang (1994-2000)

Riwayat Pendidikan di Pondok Pesantren:

Pondok Pesantren Al-Irsyad Rembang (1981-1986)

Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Rembang (1981-1986)

Pondok Pesantren Al-Mahalli Pleret (1994-2000)

Pengalaman Pekerjaan:

Anggota DPRD DIY (2004-2009)

Anggota DPRD DIY (2009-2014)

Direktur Utama PT PKPSD DIY (2015 - sekarang)

Wakil Bupati Bantul (2016-2021)

Pengalaman Organisasi:

Ketua LTN PCNU Bantul (1995-2000)

Penasehat PC GP Ansor Bantul (2012-2015)

Sekretaris DPC PKB Bantul (1999-2009)

Wakil Ketua DPW PKB (2004-2009)

Ketua DPC PKB Bantul (2012-2017)

LAMPIRAN

CUPLIKAN PIDATO LAHIRNYA PANCASILA SOEKARNO 1 JUNI 1945 RUMUSAN SILA MUFAKAT

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah per musyawaratan perwakilan .

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sini lah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60,70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar h i d u p di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, h i d u p l a h Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % yang

memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjuangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat!

Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen, itu adil, – fair play!. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan